

Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi

Ika Setyorini¹ Imam Yahya² Sukendar Sukendar³

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNSIQ Wonosobo¹

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang²

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang²

Email: ikasetyorini@unsiq.ac.id¹ imam_yahya@walisongo.ac.id² sukendar@walisongo.ac.id³

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum bagi Bangsa Indonesia diambil dari pemikiran yang sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Sehingga dalam membangun bangsanya membutuhkan pemimpin nasional yang mampu melandaskan nilai-nilai kepribadian Pancasila untuk mengantisipasi perubahan di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang gambaran yang nyata. Pendekatan yang bersifat penelitian hukum normatif /kepuustakaan yang bersumber dari pustaka, buku, serta karya ilmiah jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya untuk melihat konsep revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan pasca reformasi. Kepemimpinan yang diharapkan pada era pemerintahan pasca reformasi yang bernilai Pancasila bisa diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional dimana segala kebijakan negara dan program pemerintah harus bernilai didalamnya. Hal ini diantaranya: a) mencakup pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, b) Penerapan sistem pemerintahan yang transparatif dan akuntabel, c) pengambilan Keputusan yang berbasis pada kepentingan umum dan keadilan sosial, d) penguatan Lembaga demokrasi yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pancasila, Pemimpin, Reformasi

Abstract

Pancasila as the basis of the state and the source of law for the Indonesian nation is taken from ideas that existed long before the Indonesian nation was born. So that in building the nation, it needs a national leader who is able to base the values of Pancasila personality to anticipate changes in the midst of current social, political, and economic dynamics. Along with the rapid and complex changes in globalization, the challenges faced by countries in building effective and efficient national leadership. This study uses a type of library research with a qualitative approach method. The qualitative approach method is a research used to understand the phenomenon of the real picture. In this case, the author uses an approach that is normative/literature research sourced from literature, books, and journal scientific papers that are relevant to the subject matter. These sources are taken from various works to see the concept of Pancasila revitalization in building post-reform leadership. The leadership expected in the post-reform government era that has the value of Pancasila can be applied in the practice of national leadership where all state policies and government programs must be valued in it. These include: a) including character building based on Pancasila, b) the implementation of a transparent and accountable governance system, c) decision making based on public interest and social justice, d) strengthening democratic institutions that are able to accommodate and channel the aspirations of the people.

Keywords: Revitalization, Pancasila, Leader, Reform



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dilatarbelakangi situasi politik saat itu, negara membangun landasan idiologi bangsa yang mengokohkan, yaitu Pancasila sebagai sistem nilai kebangsaan dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dianggap sebagai *philosofische grondslag*, dimana Pancasila menjadi landasan kehidupan bernegara, khususnya dalam ketatanegaraan. Bentuk Negara Kesatuan Republik ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) berbunyi, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sementara posisi kedaulatan dalam konsep kenegaraan yang diletakkan pada rakyat yang tegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Namun pengaturan tersebut, meski tidak selalu berjalan, namun memiliki cita-cita kedaulatan Negara yang diatur berdasarkan atas hukum, bukan otoritas kekuasaan tertentu (Yusa, 2016 : 13).

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum bagi Bangsa Indonesia diambil dari pemikiran yang sudah ada jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Sehingga dalam membangun bangsanya membutuhkan pemimpin nasional yang mampu melandaskan nilai nilai kepribadian Pancasila untuk mengantisipasi perubahan ditengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Seiring dengan perubahan globalisasi yang sangat cepat dan kompleks, tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam membangun kepemimpinan nasional yang efektif dan efisien. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan berbagai agama, budaya dan suku bangsa mampu membangun sebuah kepemimpinan yang menyatukan visi, nilai dan tujuan yang hendak dihadapi bangsa Indonesia. Dalam konteks ini Pancasila sebagai falsafah negara memberikan landasan yang kuat untuk membangun kepemimpinan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Nilai Pancasila ini merupakan kekayaan bangsa yang terpendam yang tetap terjaga dalam Sejarah (Hernardi A, 2023:56-64).

Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, ideologi bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai panutan akan menjadi pandangan hidup dan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sudah menjadi sangat ideal yang digunakan sebagai pegangan, dasar dalam tatanan kehidupan sehingga kesederajatan dan kesejahteraan dapat tercapai (Hakim & Mazid: 2021). Kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila merupakan suatu upaya membumikan Pancasila dari berbagai faktor yang ada, yang tentunya kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila harus dapat menginternalisasikan dan mengambil seluruh nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam perkembangan dunia saat ini.

Organisasi dan masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab untuk mengukuhkan, membentuk, menyatukan dan menciptakan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Dalam kepemimpinan disini mereka bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah kegiatan dan merupakan program kerja dalam pengambilan keputusannya. Pancasila sebagai dasar dalam kepemimpinan harus mampu menjadi identitas nasional Bangsa Indonesia yang tentunya membedakan dengan bangsa lainnya. Kepemimpinan yang berbasis Pancasila dapat menjadikan representasi yang kuat dan konsisten dari identitas nasional Indonesia. Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia, sehingga dengan Pancasila kepemimpinan yang ada tentunya berlandaskan pada nilai nilai yang terkandung didalamnya.

Menurut Mattulada, revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali tradisi (Shofan, 2019). Sehingga akan berakibat upaya untuk membuat sesuatu yang signifikan dan sangat diperlukan. Kata revitalisasi juga sering digunakan untuk suatu alasan yang utuh, seperti revitalisasi partai politik, revitalisasi fungsi kebangsaan, revitalisasi rekrutmen politik dan revitalisasi lainnya seiring perkembangan zaman. Implementasi revitalisasi apabila dikaitkan dengan kepentingan bangsa dan negara diharapkan dapat menghasilkan upaya mendidik masa

tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta peran dan fungsinya dalam perjuangan sebuah partai politik dalam sebuah negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, penerapan dan pengalaman Pancasila berlangsung secara dinamis, tanpa diterpa dari ujian dan tantangan. Dimulai dari orde lama, orde baru dan orde reformasi yang telah berlangsung, mengadopsi caranya masing-masing dalam merespon situasi semacam itu. Itu. Pada masa pemerintah orde lama Pancasila datang dalam beberapa fase awal kemerdekaan. Dalam penetapan UUD 195 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dimana Pancasila dirumuskan tidak serta menyudahi perdebatan tentang dasar negara serta tidak pula menghentikan perdebatan ambisi berbagai pihak untuk emmaksakan idiologi lain selain Pancasila.

Atas dasar contoh diatas menjadi bukti argument bahwa peristiwa pembrontakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1948 yang memaksakan Islam sebagai dasar Negara, dan sementara PKI mendesak Komunisme menjadi Dasar Negara. Pada peristiwa berikutnya ternyata Pancasila sebagai dasar negara masih terus diuji yang artinya masih ada kemungkinan munculnya Gerakan perjuangan idiologi alternatif selain Pancasila. Pada perkembangan berikutnya muncullah pemikiran dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi itu dalam kelompok dua kubu yaitu : mereka yang berupaya menempatkan Pancasila sebagai pandangan dunia atau falsafah bangsa dan mereka menempatkan Pancasila sebagai sekedar kompromi politik antara golongan nasionalis dan golongan Islam yaitu antara tokoh Sutan Takdir Ali Syahbana dan Hamka, Mihammad Nasir dkk. Perbincangan inilah yang disebut awal peristiwa dalam persidangan BPUPKI dan PPKI (Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, 2013:9).

Peristiwa lain selain dari peristiwa awal kemerdekaan masih muncul beberapa peristiwa yang akan merongrong hadiranya dasar negara Pancasila dari orde lama, dan orde baru bahkan sampai dengan orde reformasi. Pada era reformasi yang dipeloori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai Gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi diberbagai bidang politik, ekonomi dan hukum (Kaelan, 2000: 245). Pada era ini muncullha euphoria untuk melakukan penataan perangkat-perangkat negara dengan tuntunan adanya liberalisasi politik. Pada masalah bersifat cenderung fobia terhadap Pancasila yang digambarkan sebagai semangat meninggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagaian dari masa lalu dan menggantikan sesuatu yang baru yang berakibat melupakan akan Pancasila sebagai norma dasar sebagai payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga dari beragai suku bangsa adat istiadat budaya Bahasa agama dan afiliasi politik.

Meskipun dewasa ini Pancasila merupakan dasar negara Indoensia yang syah, tetapi pada hakekatnya esensi-esensinya tidak secara kuat mendasari kebijakan-kebijakan pembanguna nasional. Kondisi ini kemudian berdampak cukup fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa reformasi yang mempertanyakan arah Gerakan reformasi dan demokratisasi sehingga ada seruan yang disampaikan Azyumardi Azra direspon sejumlah kalangan dan membuat dikursus mengenai revitalisasi Pancasila meluas dalam berbagai kegiatan akademik serta menghiasi ruang public. Wacana ini yang kemudian mengemuka untuk mengisi dan menjalankan agemda reformasi. Dalam perspektif hukum, menurut Arief Hidayat, mengartikan revitalisasi Pancasila sebagai upaya internalisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar dan rambu-rambu hukum nasional. Revitalisasi Pancasila sebagai idiologi juga dimaknai sebagai upaya mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, mulai dari pembentukan hukum hingga pelaksanaan dan penegakan hukum. Revitalisasi perlu dilakukan untuk menjadikan Pancasila sebagai paradigma ber hukum guna memperkecil jarak antara *das sollen dan das sein*, sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila seantiasa bersemayam dalam

hukum (Hidayat, 2016). Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus melalui pendekatan kultural dan structural/ Dalam pendekatan structural, pendekatan kultural hendaknya menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses Pendidikan dan pembiasaan oleh segenap komponen bangsa terlebih para generasi muda yang kuat dan gigih semangat kebangsaannya. Upaya kultur yang dahadap dalam merevetilisasikan Pancasila yang kita hadapi adalah dengan kuatnya *in group feeling*, *tntonsentrime* dan *eksklusivisme*. *Etnonsentrime* dan *eksklusivisme* yang kurang baik dikarenakan hanya menutup diri dari lingkungan sekitar dan hanya mengembangkan kehidupan dalam kelompok sendiri (Sulasmono: 2019).

Kepemimpinan diartikan sebagai pelaksana otoritas dan pembuat Keputusan (Dubin dalam Fiedler, 1967). Kepeimpinan adalah suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisiten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu masalah bersama dalam kelompok/organisasi. Tery merumuskan bahwa kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan, biasanya kekuasaan merupakan sarana bagi pemimpin untuk mempengaruhi perilaku pengikutnya. Dalam kepeimpinan suatu negara atau pemerintah mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Dalam upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai maka perlu diwujudkan kepeimpinan Pancasila yang memiliki jiwa/semangat Pancasila dengan sikap yang konsisiten dan konsekwen dalam pengamalan Pancasila dalam pengalaman Pancasila sehari hari yang berdasarkan demokrasi. Prinsip dasar kepemimpinan Pancasila yaitu kesadaran akan dirinya sebagai Insan Hamba Tuhan Yang Maha Esa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang Gambaran yang nyata. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat penelitian hukum normatif kepustakaan yang bersumber dari pustka, buku, serta karya ilmiah jurnal yang relevan dengan pokok permasalahan. Sumber-sumber tersebut diambil dari berbagai karya untuk melihat konsep revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan pasca reformasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tekhnik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tekhnik dokumentattatif karena lebih mengacu pada penelitian Pustaka/literer. Tekhnik dokumentatif dilakukan dengan cara mengumpulkan membaca dan mempelajari bahan data primer maupun sekunder yang secara tidak langsung membeicarakan namun bersifat relevan. Metode yang digunakan untuk menganalisa data diperoleh secara kualitatif. Daam menganalisa atau membahas dengan tujuan untuk memperoleh bagaimana revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk kepemimpinan pasca reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Kepemimpinan Negara

Pancasila dalam *Grundnorm* atau norma dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur konstitutif dan regulative yang dikatakan sebag sumber dari segala hukum dan landasan filosofos dari bangunan hukum nasional, dan berbagai manifestasi budaya Indonesia, yang memancarkan dan menhadirkan "*Geistlichen Hintergrund*" yang khas. Kepemimpinan berlandaskan Pancasila merupakan upaya membumikan Pancasila pada semua organisasi Lembaga baik ditingkat lokal nasional bahkan dunia. Kepemimpinan Pancasila tentunya harus dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara mutlak dan implemtatif di Tengah

terbukanya tatanan global. Pemimpin organisasi dalam Lembaga masyarakat dan negara merupakan kunci utama dapat terwujudnya lingkungan dan budaya organisasi/Lembaga yang Pancasila. Pemimpin disini diharapkan memiliki kewajiban menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para anggotanya dengan memasukkan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan pada organisasi atau Lembaga. Revitalisasi memiliki makna membuat sesuatu hal agar menjadi lebih hidup dan lebih giat kembali. Revitalisasi adalah membuat sesuatu agar lebih baik dan diterapkan dalam masyarakat. Sehingga revitalisasi adalah proses, cara, atau perbuatan menghidupkan atau menguatkan kembali agar secara kontinyu terus lebih baik penerapannya. Revitalisasi Pancasila meruakan upaya untuk menggiatkan kembali atau mengaktifkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditengah perkembangan dunia yang makin mengglobal guna meneguhkan jati diri bangsa (Kamus Bahasa Indonesia, 2008).

Revitalisasi adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan serta nilai yang diserap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang berakar dari kenajenukan seluruh komponen Bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila dalam membangun kepemimpinan dewasa ini diharapkan dapat menggiatkan kembali nilai-nilai Pancasila ditengah perkembangan global dan berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (Husodo, S.Y, 2010). Kepemimpinan yang ada dalam negara saat ini diharapkan memiliki tanggung jawab menerapkan nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang mata airnya selalu mengalir guna memberikan kesejukan kepada segenap warga bangsa Indonesia, yang diharapkan adanya pemimpin yang mejadi pedoman berilaku dan bersikap tegas dan jelas. Dalam upaya revitalisasi dalam kehidupan negara dalam kehidupan berbagsa dan bernegara sangatlah kompleks. Tantangan yang ada kedepan ada dual hal yaitu internal dan eksternal. Tantangan internal antara lain meliputi: (1) masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit; (2) pengabaian terhadap keentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan; (3) kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan; (4) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku Sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; dan (5) tidak berjalannya penegakan hukum optimal. Adapun yang merupakan tantangan eksternal meliputi; (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antarbangsa yang semakin tajam; dan (2) makin kuatnya insitas kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Pancasila yang kita hadapi adalah dengan kuatnya *in group feeling*, *ntonsentrime* dan *eksklusivisme*. *Etnonsentrime* dan *eksklusivisme* yang kurang baik dikarenakan hanya menutup diri dari lingkungan sekitar dan hanya mengembangkan kehidupan dalam kelompok sendiri (Sulasmono: 2019).

Jika mengacu pada lima sila Pancasila, maka Pancasila sebagai ini karakter bangsa Indonesia, mengandung lima karakter, yakni (1) transedensi, menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (2) humanis, setiap manusia pada hakekatnya setara dihadapan Tuhan kecuali ketakwaan dan ilmu yang membedakannya, manusia diciptakan sebagai subyek yang memiliki potensi;(3) kebinekaan, keasadaran akan ada sekian banyak perbedaan didunia, akan tetapi, mampu mengambil kesamaan untuk menumbuhkan kekuatan;(4) liberasi, pembahasan atas penindasan sesama manusia, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya penjajahan manusia oleh manusia;dan (5) keadilan, merupakan kunci kesejahteraan, adil tidak berarti sama, tetapi proporsional (Gunawan I, 2013).

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara sejak 17 Agustus 1945 menjadi rujukan kepemimpinan yang didasarkan atas prinsip-prinsip Pancasila, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas negara. Kebergaman yang menjadi ciri khas

masyarakat Indonesia, baik dari segi budaya, agama, suku, maupun bahasa menjadi sebuah potensi besar namun juga menyulitkan dalam mencapai consensus nasional. Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah ketidak seimbangan dalam penghayatan dan penerapan nilai-nilai keberagaman atau toleransi di tengah masyarakat. Terjadinya ketimpangan sosial ekonomi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi stabilitas negara. Disparitas pendapatan, akses terhadap pendidikan dan Kesehatan, serta kesenjangan antara kehidupan perkotaan dan pedesaan yang menjdisumber ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dengan demikian dibutuhkanlah pemimpin nasional yang berkarakter atau berkepribadian Pancasila. Karakter pemimpin Pancasila adalah seseorang pemimpin yang menyelipkan nilai-nilai Pancasila seperti releigijs, beretika dan bertanggungjawab dalam gaya kepemiminannya, sehingga akan menarik perhatiannya kepada masyarakat serta setia dan memegang teguh nilai-nilai yang ditinggalkan para pejuang bangsa dan generasi berikutnya (Permadi, 35-34).

Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang mempunyai integritas dan peranan sentral terutama dalam konteks jiwa Pancasila Kejujuran dan moralitas bukan hanya menjadi fondasi kuat untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Pemimpin yang berjiwa Pancasila adalah pemimpin yang merupakan investasi dan juga asset berharga bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari didirikan negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara tentunya diperlukan langkah langkah kongkret dinatara dengan penguatan karakter kebangsaan berbasis Pancasila, dialog anatara agama dan suku, kerjasama internasional yang mnedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan demikian maka konsep membangun kepemimpinan yang berjiwa Pancasila dapat terus berjalan menuju cita-cita Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat.

Kepemimpinan Negara Pasca Reformasi

Pemimpin dalam sebuah negara adalah suatu birokrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam perjalanan hidup masyarakatnya. Seorang pemimpin harus bisa memberikan keteladanan yang baik dihadapan masyarakat serta mampu memberikan kesempatan dalam pengambilan Keputusan. Bila seorang pemimpin tidak mampu memberikan keteladanan yang baik dihadapan masyarakat maka kemungkinan masyarakat akan mengambil Keputusan yang sama yang dilakukan pemimpinannya. Oleh kraen itu misalnya dalam usaha memberantas korupsi peran seorang pemimpin dapat diwujudkan melalui penerapan kepemimpinan Pancasila yaitu suatu kepemimpinan yang memiliki jiwa semangat Pancasila dengan sikap yang konsisten dan konsekwen dalam pengalaman nilai-nilai/norma-norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan tata demokrasi. Prinsip-prinsip dasar Kepemimpinan Pancasila yaitu kesadaran akan dirinya sebagai Insan Hamba Tuhan Yang Maha Esa, Insan Politik Pancasila, Insan Ekonomi Pancasila, Insan Sosial Budaya Pancasila dan Sebagai Insan Warga negara Indonesia yang berPancasila (Widana, 2016: 9). Dalam perkembangan selanjutnya kepemimpinan yang diharapkan pada era pemerintahan pasca reformasi yang bernilai Pancasila bisa diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional dimana segala kebijakan negara dan program pemerintah harus bernilai didalamnya. Hal ini diantaranya: a) mencakup pembangunan karakter bagsa yang berlansadakan Pancasila, b) Penerapan sistem pemerintahan yang tarnsparantif dan akuntabel, c) pengambilan Keputusan yang berbasisi pada kepentingan umum dan keadilan sosial, d) penguatan Lembaga demokrasi yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya yang diharapkan bagi seorang pemimpin nasional pasca reformasi adalah pemimpin yang harus mempersatukan beragam komponen bangsa dimana seorang pemimpin dapat menjalankan

rencana organisasinya serta mencapai target yang ditetapkan, Pemimpin nasional juga harus memiliki cita-cita/visi yang jelas dalam menawa bangsa menuju kesejahteraan, tidak putus asa, pantang menyerah, mentap baja mau belajar dari kegagalan dan senantiasa berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Pemimpin nasional Indonesia Pasca reformasi diharapkan dapat mampu menjawab semua permasalahan yang rumit yang dihadapi bangsa dan negara (Antastasi; dkk, 2024: 6-9).

KESIMPULAN

Kepemimpinan yang ada dalam negara saat ini diharapkan memiliki tanggung jawab dalam menerapkan nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber nilai yang memberikan kesejukan kepada segenap warga bangsa Indonesia, sehingga dengan nilai Pancasila diharapkan dengan pemimpin yang menjadi pedoman berilaku dan bersikap tegas dan jelas. Pemimpin yang berjiwa Pancasila adalah pemimpin yang merupakan investasi dan juga asset berharga bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan dari didirikan negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara tentunya diperlukan langkah langkah kongkret di antara penguatan karakter kebangsaan berbasis Pancasila, dialog antara agama dan suku, kerjasama internasional yang mnedepankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Dengan demikian maka konsep membangun kepemimpinan yang berjiwa Pancasila dapat terus berjalan menuju cita-cuta Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam perkembangan selanjutnya yang diharapkan bagi seorang pemimpin nasional pasca reformasi adalah pemimpin yang harus mempersatukan beragam komponen bangsa dimana seorang pemimpin dapat menjalankan rencana organisasinya serta mencapai target yang ditetapkan, Pemimpin nasional juga harus memiliki cita-cita/visi yang jelas dalam menawan bangsa menerima kesejahteraan, tidak putus asa, pantang menyerah, mental baja mau belajar dari kegagalan dan senantiasa berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Pemimpin nasional Indonesia Pasca reformasi diharapkan dapat mampu menjawab semua permasalahan yang rumit yang dihadapi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, 2013.
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13.
- Gunawan, I, 2013, *Revi, Jurtalisasi Karakter Guru menurut Filosifis Jawa: Sebuah Gagasan Mengembangkan Kepribadia Siswa, Proceeding Internasional Seminar on Local Wisdom ang Carakter Education for Elentary School Student*.
- Hakim, S., & Mazid, S. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Jamaah Kopdariyah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1), 91-97.
- Husodo, S, Y, 2010, *Reaktualisasi Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disajikan dalam Sarasehan Malang Corruption Watch, Universitas Brawijaya, Malang.
- I Dewa Ketut Karta Widana, 2016, *Peran Kemimipinan Pancasila Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Era Pemerintahan Reformasi* Artikel Ilmiah: Kepemimpinan Startegik Prodi MB FMP Universitas Pertahanan Kampus Sentul Bogor.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily, 2002, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Jakarta: Pusat Studi Ilmu Hukum UI.

- Permady, G. C., Zulfikar, G., Sulistiono, A., & Laim, B. F. N. (2021). Pembentukan karakter kepemimpinan pancasila di politeknik pelayaran sorong (suatu telaah pada mata kuliah pendidikan pancasila). *JPB: Jurnal Patria Bahari*, 1(2), 35-45.
- Sulasmono, B. S. (2019). Peluang Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Satya Widya*, 35(1), 75-85.